

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BERDASARKAN
KONSEP VALUE FOR MONEY PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HILIR



OLEH :

FANI FARATAMA

185310944

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S.1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2023

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Edit dengan WPS Office

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Objek Penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Mengukur dan menganalisis kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dengan konsep *Value For Money* tahun 2018-2020. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif, Jenis dan Sumber data dalam Penelitian ini adalah Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan Dokumentasi, Teknik analisis data dalam Penelitian ini adalah teknik analisis Deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 sampai dengan 2020 di ukur dengan konsep Value For Money telah Ekonomis, tidak Efektif dan Efisien.

Kata kunci : *Value For Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektifitas.*

ABSTRACT

This research was conducted in Rokan Hilir District, Riau Province. The object of this research is the Tourism, Youth and Sports Office of Rokan Hilir Regency. The purpose of this study was to measure and analyze the performance of the Rokan Hilir Regency Youth and Sport Tourism Office with the Value For Money concept for 2018-2020. This research is a descriptive research. The types and sources of data in this research are primary and secondary. Data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis technique in this research is a descriptive analysis technique. The results of this study indicate that the performance of the Rokan Hilir Regency Tourism, Youth and Sports Service from 2018 to 2020 is measured by the Value For Money concept, which is economical, not Effective and Efficient.

Keywords: Value For Money, Economical, Efficiency, Effectiveness.

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan Puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Berdasarkan Konsep *Value For Money* Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk di penuhi untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati Penulis mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan datang dari penulis dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt.

Penulisan Skripsi ini tidak akan berhasil, tanpa ada bantuan dan tunjuk ajar dari pihak lain . Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya Skripsi ini.

Segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih terkhususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL selaku Rektor Univeritas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., M.M.,C.,R.B.C selaku Dekan Fakultas

Ekonomi & Bisnis.

3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE.,M.Si.,Ak,CA selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis.
4. Bapak Dr.H.Abrar, M.Si.,Ak.,CA Selaku Dosen Pembimbing yang benar benar penulis rasakan, membimbing dengan sabar dan penuh dedikasi membantu penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dian Saputra, SE,M.Acc.,Ak.,CA Selaku Penasehat Akademik saya di Prodi Akuntansi.
6. Kedua Orang Tua Saya yang bersusah payah mengkuliahkan saya.
7. Erma Suryani, S.Pd Selaku Partner yang selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyampaikan harapan semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Pekanbaru, 27 Desember 2022

Penulis

FANI FARATAMA
185310944

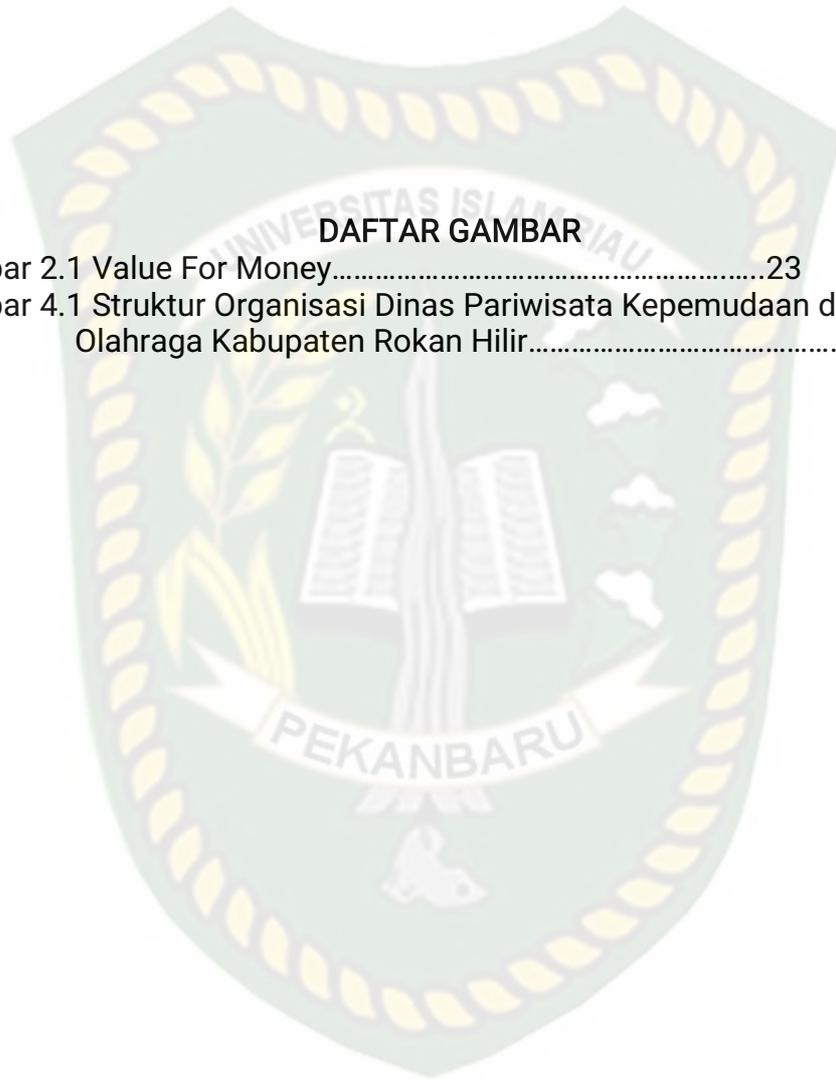
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 Pengertian Kinerja	11
2.1.2 Penilaian kinerja	12
2.1.3 Indikator kinerja	13
2.1.4 Pengertian Anggaran	14
2.1.5 Anggaran berbasis kinerja	15
2.1.6 Prinsip anggaran berbasis kinerja	17
2.1.7 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja	19
2.1.8 Proses penyusunan Anggaran Pemerintah	19
2.2 Konsep Value for money	21
2.2.1 Pengertian <i>Value for money</i>	21
2.2.2 Elemen-Elemen <i>Value for money</i>	22
2.2.3 Langkah-langkah pengukuran <i>Value for money</i>	26
2.2.4 Tujuan <i>Value for money</i>	27
2.2.5 Indikator Kinerja dalam <i>Value For Money</i>	28
2.3 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber data	30
3.4 Teknik pengumpulan data	31
3.5 Teknik analisis data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.1.1 Profil Kabupaten Rokan Hilir	35

4.1.2 Profil Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.....	36
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	
Kabupaten Rokan Hilir.....	38
4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	
Kabupaten Rokan Hilir.....	39
4.1.5 Lokasi Penelitian.....	41
4.2 Hasil Penelitian.....	41
4.2.1. Pengukuran Ekonomis.....	41
4.2.1.1. Pengukuran Ekonomis 2018.....	43
4.2.1.2. Pengukuran Ekonomis 2019.....	48
4.2.1.3. Pengukuran Ekonomis 2020.....	52
4.2.2. Pengukuran Efisiensi.....	55
4.2.2.1 Pengukuran Efisiensi 2018.....	56
4.2.2.2. Pengukuran Efisiensi 2019.....	58
4.2.2.3. Pengukuran Efisiensi 2020.....	59
4.2.3... Pengukuran Efektivitas.....	61
4.2.3.1. Pengukuran Efektivitas 2018.....	56
4.2.3.2. Pengukuran Efektivitas 2019.....	59
4.2.3.3. Pengukuran Efektivitas 2020.....	62
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1. Hasil Perhitungan Ekonomi.....	66
4.3.2. Hasil Perhitungan Efisiensi.....	68
4.3.3. Hasil Perhitungan Efektivitas.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laopran Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir 2018- 2020.....	4
Tabel 1.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir 2018-2020.....	5
Tabel 4.1 Perhitungan Ekonomis Kegiatan Disparpora Tahun 2018	41
Tabel 4.1 Perhitungan Ekonomis Kegiatan Disparpora Tahun 2019.....	42
Tabel 4.1 Perhitungan Ekonomis Kegiatan Disparpora Tahun 2020.....	43
Tabel 4.4 Laporan Kinerja Berdasarkan Program Kegiatan Tahun 2019.....	45
Tabel 4.5 Laporan Kinerja Berdasarkan Program Kegiatan Tahun 2020.....	46
Tabel 4.6 Rasio Ekonomis Kinerja Program Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.....	49
Tabel 4.7 Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 20182020.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Value For Money.....23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.....38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja pada instansi pemerintahan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) kini menjadi pusat perhatian karena semakin tingginya kesadaran masyarakat atas pengelolaan anggaran. Masyarakat kerap menilai instansi pemerintahan sebagai tempat pemborosan, sumber kebocoran dana serta institusi pemerintah yang selalu merugi. Rakyat yang semakin cerdas dan kritis menggiginkan di lakukannya transparansi dan akuntabilitas pada lembaga pemerintahan, sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 yang di gunakan sebagai dasar reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.

Pada dasarnya penyusunan anggaran yang di lakukan oleh pemerintahan daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas tiga komponen yaitu: (1) pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai; (2) belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih; (3) pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang di akan diterima kembali, baik pada tahun anggran

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Anggaran merupakan rencana yang akan dilakukan di masa mendatang juga menginterpretasikan pernyataan perkiraan penerimaan yang akan terjadi pada atau beberapa periode yang akan datang. Oleh karena itu kinerja pengelolaan anggaran menjadi bagian penting untuk mengambil keputusan dalam suatu pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pada suatu instansi pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah di capai pada suatu periode dan di bandingkan dengan periode sebelumnya.

Anggaran Keuangan Daerah ialah salah satu bagian terpenting dalam Menyelenggarakan otonomi daerah, Kendatipun diakui variabel lain yang juga mempengaruhi kinerja keuangan daerah. sebagaimana misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana prasarana dan variabel pendukung lainnya serta pentingnya variabel keuangan daerah yang berhubungan dengan fakta bahwa mobilisasi terhadap sumber daya dari keuangan daerah di lihat sebagai bagian yang sangat krusial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) adalah bentuk salah satu pilar yang menggambarkan perencanaan serta pembangunan bagi pemerintah daerah. Dalam hal perencanaan, pemerintah daerah berusaha melakukan perbaikan untuk mengelola keuangan daerah khususnya dalam

perencanaan anggaran.

Dalam struktur pengelolaan Keuangan Daerah pada era otonomi Daerah terkait untuk mengelola APBD perlu di terapkan standar atau acuan pada suatu daerah kapan daerah tersebut bisa di katakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Maka di perlukan salah satu pengukuran kinerja keuangan pada instansi Pemerintah Daerah sebagai tolak ukur yang berguna untuk penetapan kebijakan keuangan pada periode anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja yang dapat di lakukan oleh instansi Pemerintah salah satunya dengan menggunakan metode *value for money*.

Value for money menurut Mardiasmo (2009) merupakan konsep pengelolaan untuk menilai kinerja suatu Organisasi Sektor Publik yang mendasarkan dari tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Ekonomis pada pengadaan anggaran dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) mempunyai arti mencapai tujuan serta sasaran.

Menurut Mahmudi (2019) Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja dilakukan terutama untuk mengukur tingkat 3E, yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas. Jika suatu aktivitas tidak memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal.

Pada metode manajemen strategi, mengukur kinerja mempunyai manfaat sebagai sarana penilaian apakah strategi yang di pakai sudah di tetapkan dan telah berhasil dicapai. Dengan hasil pengukuran kinerja yang di lakukan maka tercipta metode pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkepanjangan. Maka dengan hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya baik dalam perancangan ataupun pelaksanaan.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata pemuda dan olahraga, menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi pembinaan, mengembangkan usaha sarana dan prasarana pariwisata pembiayaan objek serta daya tarik wisatawan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas meliputi pelestarian, peningkatan serta pengembangan semua aspek wisata yang ada di Kabupaten Rokan hilir. Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir bisa di lihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir di bawah ini :

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir 2018-2020

Tahun	Anggaran pendapatan		Persentase Realisasi anggaran
	Anggaran	Realisasi	
2018	9.316.048.273	7.559.765.936	81,14%
2019	13.532.871.560	9.262.114.982,20	68,44%
2020	13.942.321.000	9.765.303.593	70,04%

Sumber: Lakip Dispora Kabupaten Rokan hilir 2018-2020

Tabel 1.2
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir 2018-2020

Tahun	Belanja langsung		%	Belanja tidak langsung		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2018	5.833.175.000	4.411.302.904	75,62 %	3.842.873.273	3.148.463.032	81,92 %
2019	8.947.446.427	5.451.006.871,20	60,92 %	4.585.405.133	3.811.108.000	83,11 %
2020	9.341.355.070	5.797.230.321	62,05 %	4.600.965.930	3.968.073.000	86,24 %

Sumber: Lakip Dispora Kabupaten Rokan hilir 2018-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dan 1.2 bisa dilihat bahwa pendapatan dan belanja mengalami perubahan, pendapatan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 81,14% yang mana realisasi tersebut tidak mencapai target yang di angarkan, dan belanja yang di bedakan antara belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung pada tahun 2018 terealisasi sebesar 75,62% serta belanja tidak langsung terealisasi sebesar 81,92%. Realisasi pendapatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 68,44% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi tidak mencapai target yang di angarkan, sedangkan belanja langsung sebesar 60,92% dan belanja tidak

langsung sebesar 83,11%. Dan pada tahun 2020 realisasi pendapatan yaitu sebesar 70,04% juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan belanja langsung dan tidak langsung juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 62,05% dan 86,24% dari yang telah di anggarkan. Sedangkan realisasi program Dinas Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Rokan hilir tahun 2018 yang dimulai dari peningkatan kunjungan wisata ke kabupaten Rokan Hilir di targetkan kunjungan 23.000 wisatawan dalam 1 tahun, dan realisasinya di tahun 2018 sebesar 75.000 orang, dari jumlah realisasi tersebut berdampak dengan peningkatan jumlah penginapan yang mengisi hotel-hotel serta berdampak dengan Pendapatan Daerah. Untuk kegiatan pengembangan ekonomi kreatif daerah mempunyai sasaran peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif, jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya pada tahun 2018 di targetkan 33 orang dan realisasinya sebesar 5 orang, dari realisasi ini berdampak kurangnya lapangan kerja baru bagi masyarakat di karenakan kurangnya minat pelaku usaha ekonomi kreatif. Program peningkatan sarana dan prasarana di tahun 2018 tidak di anggarkan, ini berdampak pada infrastruktur dan sarana olahraga yang belum ada progress untuk menunjang para atlit di kabupaten rokan hilir. Program selanjutnya yaitu Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga yang mana program tersebut yaitu Pelaksanaan *car free day* Kabupaten Rokan Hilir dengan anggaran sebesar Rp.130.365.000 terealisasi sebesar Rp.74.194.000 dimana kegiatan tersebut realisasinya sebesar 56,91% dan

program ini berdampak bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, program lainnya yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Pekanbaru dengan anggaran Rp.500.000.000 terealisasi sebesar Rp.436.846.000 atau 87.37% dampak dari program ini yaitu untuk prestasi cabor yang ada di Rokan Hilir di Provinsi Riau. Pada Tahun 2019 program peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Target serta realisasinya menurun pada tahun sebelumnya, yang mana target Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 yaitu 26.000 orang, terealisasi sebesar 64.500 orang. Untuk Kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif baik dari segi seni berbasis budaya maupun desain mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, baik dari target serta realisasinya, target sebesar 42 orang terealisasi sebesar 60 orang dan untuk desain targetnya sebesar 23 orang dan terealisasi sebesar 43 orang. Ini berdampak bahwa masyarakat sudah mulai mempunyai usaha usaha ekonomi kreatif dan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja karena tumbuhnya pegiat ekonomi kreatif. Program pengiriman atlet berprestasi mahasiswa pada 2019 dengan anggaran Rp.100.00.000 namun tidak terealisasi, dampaknya yaitu tidak ada dari atlet mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut mengakibatkan prestasi olahraga menurun. Serta workshop kerajinan kulit kerang & workshop kerajinan limbah sawit/mangrove yang memiliki anggaran sebesar Rp.149.670.000 & Rp.90.447.327,00 tidak terealisasi, tidak terealisasinya program ini berdampak pada masyarakat yang kurang

akan pelatihan guna membuka peluang usaha baru di Kabupaten Rokan Hilir. Di tahun 2020 Program kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir di targetkan sebesar 27.000 orang sedikit lebih naik dari tahun sebelumnya, namun realisasinya menurun sebesar 25.000 orang ini berdampak makin turunnya wisatawan yang menginap dan berdampak pada pendapatan daerah. Program peningkatan peran masyarakat dalam jumlah pelaku ekonomi berbasis seni budaya memiliki target sebesar 40 orang dan realisasi sebesar 65 orang, realisasi sedikit naik dari tahun sebelumnya dan iptek 25 orang serta realisasinya sebesar 45 orang realisasinya sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Program selanjutnya yaitu peningkatan kualitas prestasi olahraga di antaranya Presentase rekor nasional yang di kuasai oleh atlet Daerah yang targetnya sebesar 48% dengan realisasi sebesar 30,01% dan Presentase Program cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi nasional di targetkan sebesar 30% namun realisasinya 0%, dampak program ini berpengaruh terhadap atlet rokan hilir yang kurang berprestasi di tingkat nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Berdasarkan Konsep *Value For Money* Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dari objek penelitian ini yaitu Bagaimanakah Kinerja

Pengelolaan Anggaran Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Masalah yang di kemukakan di atas, Maka tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja pengelolaan Anggaran dengan menggunakan konsep *Value For Money* Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengukuran Kinerja Pengelolaan Anggaran dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

b. Bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Dari hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan untuk di pertimbangkan mengenai Pengukuran Kinerja Pengelolaan Anggaran dengan menggunakan konsep *Value For Money* Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan hilir.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau penelitian mengenai Kinerja Pengelolaan Anggaran menggunakan *Konsep Value For Money*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Menggunakan Konsep *Value For Money*.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variable penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

4. BAB VI HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di

masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan bagian mengenai tahap pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terkandung dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja kerap digunakan untuk menyatakan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa dilihat jika individu atau kelompok tersebut mempunyai standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Torang (2012) Kinerja adalah kualitas atau kuantitas hasil dari kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Sedangkan Menurut Wibowo (2010) Kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja.

Kinerja menjadi cerminan kemampuan dan keterampilan dalam pekerjaan tertentu. Menurut Sutrisno (2016) kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas hasil kerja yang dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

2.1.2 Penilaian kinerja

Penilaian Kinerja atau *Performance Appraisal* (PA) adalah sebuah sistem yang formal digunakan dalam beberapa periode waktu tertentu untuk menilai prestasi kerja seorang karyawan. Selain itu, penilaian kinerja dapat berfungsi untuk mengidentifikasi, mengobservasi, mengukur, mendata, serta melihat kekuatan dan kelemahan dari karyawan dalam melakukan pekerjaan. Penggunaan penilaian kinerja ini dapat meningkatkan performa kerja karyawan. Penilaian kinerja benar-benar didesain sedemikian rupa untuk membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi dan memotivasi performa karyawan. Kegunaan dalam penggunaan penilaian kinerja ini adalah untuk meningkatkan performa kerja dari karyawan. Penilaian kinerja benar-benar didesain sedemikian rupa untuk membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi dan memotivasi performa karyawan (Iqbal et al, 2011)

Menurut Hartantik (2014), Penilaian kinerja merupakan cara sistematis untuk mengevaluasi prestasi, kontribusi, potensi, dan nilai dari seseorang karyawan oleh orang-orang yang di beri wewenang perusahaan

sebagai landasan pengembangan. Penilaian kinerja di pakai untuk menilai kesuksesan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan. Termasuk informasi efisiensi penggunaan anggaran dalam merealisasikan rancangan kegiatan, perbandingan hasil dan target, serta efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. Penilaian kinerja merupakan suatu tugas penting untuk di laksanakan oleh menejer atau pimpinan. Kegiatan penilaian sangat penting, karena bisa digunakan untuk membenahi keputusan personalia untuk memberi umpan balik pada para karyawan mengenai kinerja mereka.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian kinerja untuk menilai berhasil atau tidak berhasilnya kinerja suatu organisasi, pelaksanaan program atau kegiatan. Menurut Cipta (2018) Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang mutlak harus di lakukan untuk mengetahui prestasi yang akan dicapai setiap karyawan. Penilaian kinerja merupakan suatu cara manajemen dalam menilai keefektivitasan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai hasil kerja sehingga dapat membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

2.1.3 Indikator kinerja

Pada Organisasi, harus memiliki indikator kinerja yang bisa dijadikan sumber acuan dari realiasai pengelolaan anggaran. Menurut

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan di capai dari program dan kegiatan yang telah di rencanakan. Pada indikator sesuatu kinerja harus di ukur dan di hitung serta di gunakan sebagai dasar untuk menilai dan melihat tingkat kinerja baik itu pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan kegiatan. Menurut Kristianti (2012) Pengukuran kinerja terdapat beberapa elemen yang mendasar yaitu: (1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi suatu organisasi; (2) Merumuskan indikator dan pengukuran kinerja; (3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran sasaran yang di tetapkan Organisasi; (4) Evaluasi kinerja (*feedback*) penilaian kemajuan Organisasi pada setiap periode tertentu, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan Akuntabilitas.

2.1.4 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Untuk lebih memahami pengertian dari anggaran, berikut adalah pendapat para ahli tentang anggaran :

Menurut Mardiasmo (2011) "Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan

penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.

Menurut Narifin (2012)” Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diartikan anggaran sebagai perencanaan yang disusun untuk periode dan waktu tertentu yang akan direalisasikan untuk jangka waktu tertentu. Bahwa dengan penyusunan anggaran akan mengambil tindakan yang positif untuk merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun. Anggaran di buat dalam bentuk perencanaan, anggaran yang berisi aktifitas yang akan di lakukan selama periode dan waktu tertentu sebagai alat acuan kegiatan yang akan di lakukan pemerintah serta memperlihatkan tujuan kegiatan.

2.1.5 Anggaran berbasis kinerja

Pada dasarnya Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*). Menurut Anggi Pratama & Bagus Handoko (2018) Anggaran berbasis kinerja dapat di artikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumber yang di hubungkan dengan hasil dari layanan di tingkat Pemerintah. Anggaran itu sendiri disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang di orientasikan berdasarkan *output*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 menyebutkan kinerja anggaran adalah prestasi kerja berupa keluaran dari

kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas yang terukur dan telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja didalam proses penyusunan anggaran. Menyebutkan bahwa cara yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengertian Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan anggaran berbasis kinerja yaitu "Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut".

Menurut Halim dan Iqbal (2012) Anggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Menurut Mahmudi (2016) "Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*)

yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan 31 hasil tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas, anggaran berbasis kinerja merupakan perangkat kebijakan yang mengandung satu bahkan lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah guna mencapai sasaran serta tujuan untuk memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan yang dibuat oleh instansi pemerintah sehingga setiap penggunaan anggaran yang di keluarkan dalam Renja-SKPD setiap unit kinerja pada instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan manfaat anggarannya pada DPRD serta masyarakat.

2.1.6 Prinsip anggaran berbasis kinerja

Anggaran berbasis kinerja dalam penyusunannya perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Nanda & Darwanis (2016) “Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penganggaran bagi manajemen untuk melibatkan setiap pendanaan yang direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian *outcome* dari *output* tersebut.

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai. Penganggaran berbasis kinerja sangat perlu di perhatikan bagaimana prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Nanda & Darwanis (2016) Prinsip anggaran berbasis kinerja sebagai berikut :

- a) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Penyajian informasi anggaran harus jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang diperoleh bagi masyarakat dari suatu program atau kegiatan yang dianggarkan. Pada dasarnya Masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui jalannya proses penganggaran karena berkaitan dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tersebut.

b) Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan dana pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

c) Keadilan Anggaran

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi didalam pemberian pelayanan.

d) Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan asas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang

telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan *stakeholders*.

e) Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar dari pada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.7 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Pemahaman tujuan anggaran berbasis kinerja merupakan pemahaman konseptual, karena tujuan merupakan dasar sebelum perencana menyusun anggaran berbasis kinerja sehingga perencana dapat menjelaskan arah tujuan yang akan dicapai. Secara umum tujuan anggaran berbasis kinerja yaitu untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan yang didapat dengan kinerja yang akan dicapai serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran suatu pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah (2005) tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk: 1), Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai. 2), Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.

3),Meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal melaksanakan pengelolaan anggaran.

2.1.8 Proses penyusunan Anggaran Pemerintah

Dalam Pemerintahan, anggaran berperan sebagai perencanaan, yang dinyatakan dalam nilai uang besarnya *input* yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam masa periode anggaran. Dengan adanya anggaran suatu pemerintahan tahu apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Rorong,dkk (2017) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan pendapatan Daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD, yaitu :

- a) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
- b) Penyusunan prioritas dan plafon Anggaran sementara (PPAS).
- c) Penyiapan Se-Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), penyusunan RKA-SKPD.
- d) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD.
- e) Pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD.

f) Evaluasi serta penetapan Raperda APBD penjabaran APBD.

Selanjutnya Menurut Nanda & Darwanis (2016) proses penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi:

a) Penetapan Strategi Organisasi

Penetapan strategi organisasi merupakan cara pandang jauh kedepan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang akan dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan strategi yang jelas kedepannya.

b) Pembuatan Tujuan

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam periode waktu satu tahun. Tujuan juga sering disebutkan sebagai turunan visi dan misi sari suatu organisasi.

c) Penetapan Aktifitas

Penetapan aktifitas merupakan hal yang mendasar dalam penyusunan anggaran, karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.

d) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan standar buku yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit kerja untuk

membuat kriteria-kriteria dalam menentukan peringkatnya.

2.2 Konsep Value for money

2.2.1 Pengertian *Value for money*

Value for money merupakan suatu konsep dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja *Value for money* dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. *Value for money* berlandaskan dasar tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Menurut Yulitiawati & Rusmidarti, (2020) tiga komponen dalam *Value for money* tersebut adalah :

- a. Ekonomi: pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.
- b. Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- c. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

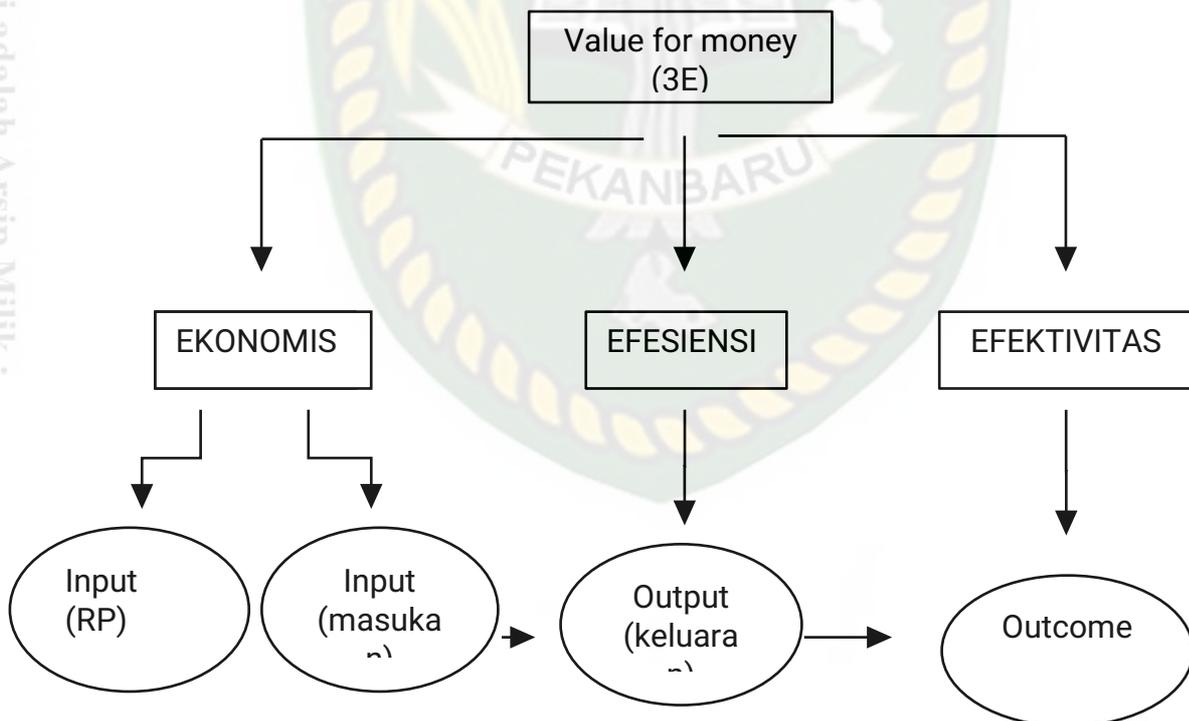
Dalam suatu Pemerintahan Daerah pengelolaan anggaran sangat dituntut untuk semaksimal mungkin dalam membelanjakan dan

mempergunakannya sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang ditetapkan serta mendahulukan kegiatan yang prioritas dan mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga ekonomi, efisiensi dan efektifitas bisa tercapai.

Value for money tidak semata mengukur biaya barang dan jasa melainkan juga memasukan gabungan dari unsur kualitas biaya, sumber daya yang digunakan, ketetapan penggunaan, batas waktu dan kemudahan dalam menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut berbentuk nilai yang baik.

2.2.2 Elemen-Elemen *Value for money*

Menurut Purwadi & Sari, (2015) *Value for money* memiliki tiga komponen utama yang mendasari yaitu :



Gambar 2.1 *Value for money*
Sumber : Fitriani, (2017)

1) Ekonomi

Ekonomi adalah perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas pada harga yang paling rendah. Ekonomi menggambarkan perbandingan antara *input* dengan *input value* dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berkaitan dengan kemampuan organisasi sektor publik sehingga dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah suatu tingkat capaian *output* maksimal dengan salah satu *input* paling rendah guna mencapai salah satu *output* tertentu. Perbandingan dalam efisiensi yaitu *output* dan *input* yang berkaitan dengan standar kinerja serta target yang telah di tentukan. Organisasi mempunyai suatu program dan kegiatan sehingga yang di katakana efisiensi apabila telah mampu menghasilkan salah satu *output* dengan *input* serendah rendahnya, atau dengan *input* tertentu dan mampu menghasilkan *output* yang besar.

3). Efektivitas

Efektivitas adalah kualitas pencapaian hasil dari program dengan target yang telah ditetapkan. Efektifitas secara sederhana merupakan perbandingan *output* dengan *outcome* serta hubungan antara *output* dengan tujuan. Jika kontribusi *output* besar terhadap pencapaian tujuan, maka program dan kegiatan dari organisasi akan semakin efektif.

Program dan kegiatan pada suatu organisasi dapat dinilai efektif jika *output* yang di hasilkan dapat memenuhi tujuan yang telah di tetapkan. *Output* yang di hasilkan dari organisasi sektor publik banyak yang bersifat *intangible* atau tidak berwujud, sehingga sulit untuk dikuantifikasikan, mengakibatkan proses pengukuran efektifitas selalu mengalami kesulitan.

Tiga hal di atas merupakan elemen pokok pada *Value For Money*, akan tetapi ada beberapa pihak yang berpendapat bahwasanya tiga elemen saja belum cukup. Perlu di tambahkan beberapa elemen lain yaitu Keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*). Keadilan mempunyai acuan dengan adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi, perlu juga di lakukannya distribusi secara merata (*equality*). Dari penjelasan tersebut dapat di artikan penggunaan uang publik baiknya tidak hanya berkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, tetapi harus di gunakan secara merata.

Untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu pemerintahan terlebih dahulu harus mengetahui tingkatan *input*, *output* dan *outcome* agar penilaian kinerja dengan metode *value for money* bisa dilakukan. Tahap pertama suatu Pemerintahan harus membuat indikator *input*, *output*, dan *outcome* kemudian tahap berikutnya adalah melakukan pengukuran *input*, *output*, dan *outcome* tersebut. Indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian kinerja, tujuan, visi, dan misi organisasi Pemerintahan.

Menurut Kariyoto (2017) Konsep dari *input*, *output*, dan *outcome* yaitu adalah

a) *Input*

Input merupakan sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, aktivitas dan program dalam pemerintahan. *Input* dapat dinyatakan secara kuantitatif juga sejumlah uang.

b) *Output*

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. *Output* juga dapat dikatakan sebagai kenaikan nilai atau nilai tambah persentase kinerja suatu pemerintahan. Pengukuran *Output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas suatu pemerintahan.

c) *Outcome*

Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan (*objektives*) atau target yang hendak dicapai. Penetapan dan pengukuran terhadap *outcome* seringkali lebih sulit dibanding penetapan dan pengukuran terhadap *input* maupun *output*.

2.2.3 langkah-langkah pengukuran *Value for money*

1) Pengukuran ekonomi

Pengukuran ekonomi dilakukan untuk mempertimbangkan masukan yang digunakan.

2) Pengukuran efisiensi

Efisiensi di ukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3) Pengukuran efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Income

Income merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau istilah lainnya mengukur kualitas *ouput* terhadap dampak yang dihasilkan, pengukuran *income* memiliki dua peran yaitu peran Retrospektif (penilaian kinerja masa lalu) dan Peran Prospektif (penilaian kinerja masa yang akan datang).

5) Estimasi indikator kerja

Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target dilakukan berdasarkan perkembangan beberapa layanan atau indikator kinerja itu sendiri.

2.2.4 Tujuan *Value for money*

Tujuan dalam pelaksanaan *Value for money* dalam mengelola suatu organisasi adalah, dari komponen ekonomi: (hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya) komponen efisiensi: (berdaya guna dalam penggunaan sumber daya) dan komponen efektivitas: (berhasil guna artinya mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai).

Selain itu tujuan mengimplimentasikan konsep *Value for money* adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Meningkatkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.2.5 Indikator Kinerja dalam *Value For Money*

Dalam suatu Organisasi Pemerintah *Value For Money* merupakan metode dari penilaian Kinerja. Kinerja Pada Pemerintahan tidak dapat dinilai secara bersamaan tetapi harus mempertimbangkan dari berbagai sisi baik itu dari segi *input* sebagai daya pelaksanaan dan *output* sebagai hasil dari kinerja seta *outcome* sebagai dampak dari aktivitas.

Ukuran kinerja pada dasarnya memiliki istilah yan berbeda dengan

istilah indikator kinerja. Acuan ukuran kinerja terhadap penilaian kinerja secara langsung, sedangkan acuan indikator kinerja untuk menilai kinerja secara tidak langsung. Hal-hal yang merupakan sifat yaitu indikasi-indikasi kinerja. Supaya dapat mengukur kinerja pada instansi Pemerintah, indikator-indikator sebagai penilaian kinerja perlu di ketahui. Maka untuk menentukan mekanisme pada kinerja tersebut diperlukan hal berikut :

1. Sistem Perencanaan dan pengendalian.
2. Spesifikasi teknis dan standardisasi.
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar.
5. Mekanisme sumber daya manusia.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka dapat diajukan hipotesisnya adalah diduga kinerja pengelolaan anggaran pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir belum efektif semua, karena rancangan Anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang terealisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dan menggunakan metode *Value for Money*.

3.2 Objek penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan proposal yaitu pada Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang berlokasi di Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi-Rohil.

3.3 Jenis dan Sumber data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada subbagian keuangan dan ketatausahaan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir desa mengenai sejarah dan proses rancangan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

3.4 Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu subbagian keuangan dan ketatausahaan langsung maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

2. Dokumen

dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, seperti profil Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga, serta LAKIP.

3.5 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik

analisis kualitatif dan kuantitatif yang menyajikan data dan menghitung kinerja

dengan metode *Value For Money* yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2016).

a) Ekonomis

Kinerja suatu pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis apabila dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Untuk mengetahui tingkat ekonomis suatu pemerintahan atau organisasi dengan melihat perbandingan antara biaya yang dikeluarkan (*input*) dengan anggaran yang dikeluarkan, Dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Input = Realisasi pengeluaran

Input Value = Anggaran Pengeluaran

Menurut Mahmudi (2013) tingkat ekonomis memiliki ketentuan sebagai berikut:

- (1) jika < 100% berarti ekonomis
- (2) jika > 100% berarti tidak ekonomis
- (3) Jika = 100% berarti tidak ekonomis seimbang

b) Efisiensi

Pengukuran Efisiensi dilakukan menggunakan Perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan menggunakan biaya atas *output* (*cash of output*). Suatu organisasi, program kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah rendahnya, atau dengan input tertentu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi adalah sebagai berikut:

$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$
--

Keterangan

Output = Hasil Capaian oleh kebijakan Program dan aktivitas

Input = Persentase Realisasi Anggaran

Kriteria Efisiensi adalah sebagai berikut :

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% (<100%) maka, tidak efisien.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% (=100%) maka, Efisiensi berimbang.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% (>100%) maka, Efisien.

c) Efektivitas

Efektivitas adalah bagaimana cara Organisasi mencapai tujuan dari sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas menunjukkan bagaimana kesuksesan atau kegagalan dari pencapaian tujuan sebuah kegiatan

dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Kegiatan Operasional dikatakan efektif jika kegiatan mencapai sasaran dan tujuan akhir kebijakan rumus untuk mengukur efektivitas ialah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program

Kriteria Efektivitas :

1. Jika perbandingan nilai Perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) Maka, Tidak Efektif.
2. Jika diperoleh nilai Perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) Maka, Efektivitas Berimbang.
3. Jika diperoleh nilai Perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) Maka, Efektif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk kedalam Kabupaten Bengkalis, tepatnya dijalan merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km terbagi dalam 15 kecamatan dan 83 desa. Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada sultan siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890.

Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat. Belanda memindahkan pemerintahannya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk menyaingi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bekas wilayah Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan Ibukota Bagansiapiapi. Administrasi pemerintahan di Rokan Hilir terdiri dari 15 Kecamatan yaitu : Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Kubu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Pujud, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Pekaitan, dan Kecamatan Kubu Babussalam.

4.1.2 Profil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir diawali dengan adanya Pembaharuan manajemen sumberdaya aparatur yang ditindaklanjuti dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengubah secara mendasar sistem kepegawaiannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menggunakan sistem kepegawaian terintegrasi (integrasi system) dalam arti Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai pemerintah nasional yang digaji oleh Pemerintah Pusat dan siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia.

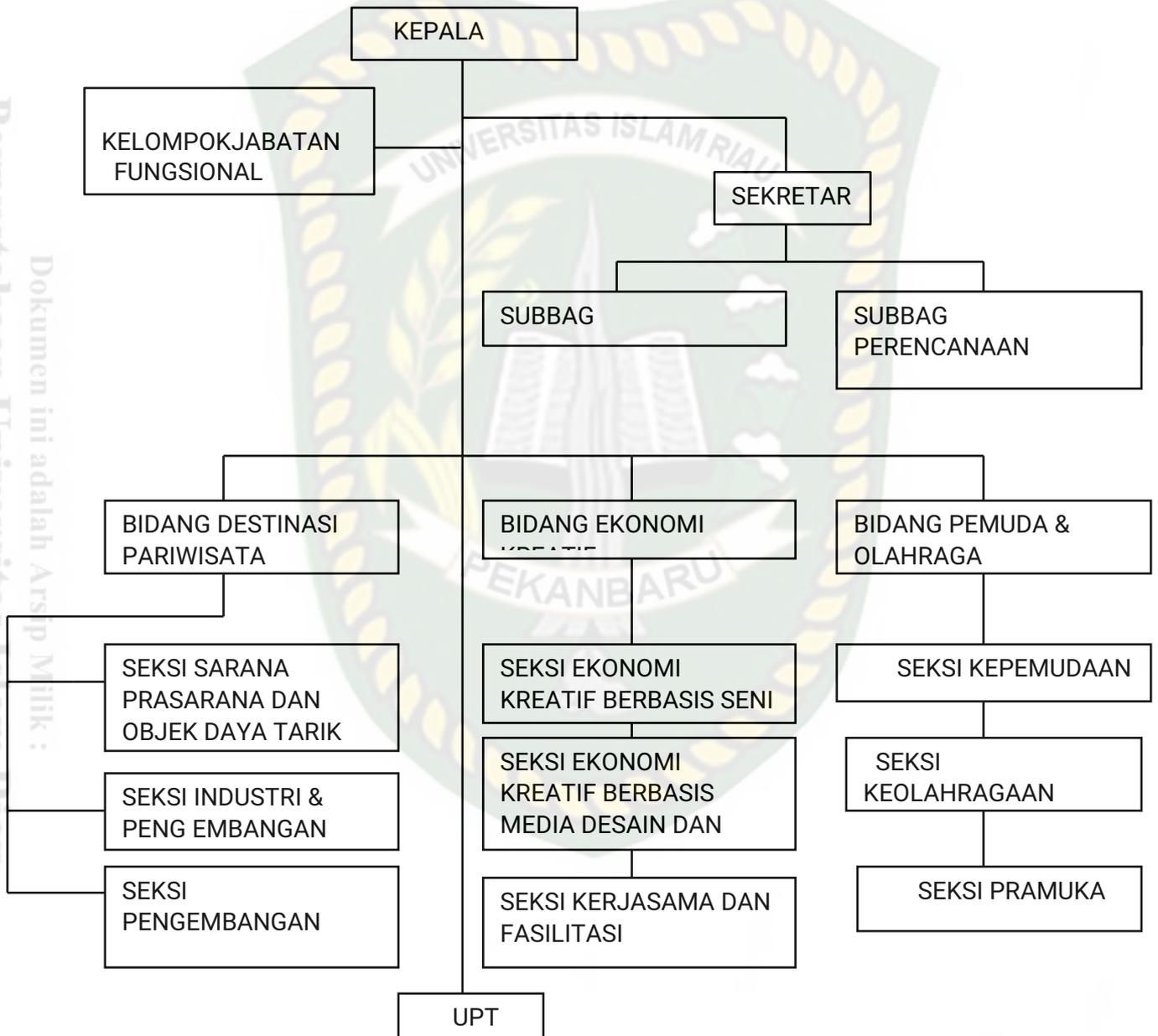
Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sistem terintegrasi tersebut diubah menjadi sistem terpisah (separated system) artinya ada pegawai pemerintah yang diangkat, digaji, ditempatkan dan

diberhentikan oleh Pemerintah Daerah. Sistem Kepegawaian Daerah dikelola secara terpisah dengan sistem kepegawaian pemerintah pusat, berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Selanjutnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan manajemen PNSD berdasarkan pasal 34 A Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian tersebut merupakan perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Kemudian Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah telah mengeluarkan Kepres RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya dalam Kepres RI disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen PNSD dalam membantu tugas pokok pejabat kepegawaian daerah.

Dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 1999 dari pemekaran Kabupaten Bengkalis dengan Ibukota Bagansiapiapi, pada tanggal 4 Oktober Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Rokan Hilir sebagai Kabupaten baru yang ada di Provinsi Riau. Dari pemekaran tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membentuk Pemerintahan untuk mengurus Daerah yang dimilikinya untuk perkembangan Daerah tersebut, salah satu instansi Pemerintahan Tersebut ialah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir



4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Rokan Hilir

Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

- 1) Bertugas untuk mengawasi serta memimpin dinas beserta staf-stafnya
- 2) Mengikuti aturan serta kegiatan pemerintahan kabupaten Rokan Hulu diatas bawahan Bupati dan Wakil bupati yang menjabat. Melakukan tugas-tugas yang tercantum dalam SK presiden Republik Indonesia.
- 3) Mengontrol segala kegiatan yang ada disatuan kerjanya.
- 4) Mengontrol staf-stafnya.

b. Seketaris

- 1) Bertugas mengawasi, mengayomi staff.
- 2) Mengambil alih tugas kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan.
- 3) Menangani masalah administrasi yang berasal dari bidang yang ada dinas tersebut.
- 4) Melaksanakan tugas juga sebagai mana yang tercantum dalam SK yang dilantik oleh bupati yang menjabat pada saat itu.
- 5) Penandatanganan untuk pengesahan kegiatan yang akan diadakan maupun administrasi lainnya.
- 6) Mengontrol staf-stafnya.

c. Kepala Bagian Destinasi Pariwisata

Memiliki tugas sebagai untuk membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merumuskan perencanaan kebijakan dalam melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian program dan kegiatan pengembangan daya tarik wisata, seksi pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

d. Kepala Subbagian Ketatausahaan

Memiliki tugas melaksanakan Penyiapan urusan Surat menyurat, Kearsipan dan pengadaan, perawatan serta pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

e. Kepala Subbagian Perencanaan Program

- 1) Melaksanakan pengumpulan data pengadaan sistematis data untuk bahan penyusunan program.
- 2) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan perencanaan program.
- 3) Menyiapkan bahan pengelolaan investasi, pengkajian, dan analisis program.
- 4) Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- 5) Melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistemasi data dan menyusun dokumentasi.
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.

4.1.5 Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang di gunakan untuk memperoleh data di dalam penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang berlokasi di Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi ,Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

4.2 Hasil penelitian

Hasil penelitian metode *Value For Money* yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dengan 3 elemen yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. Data yang diolah yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Penelitian ini mengukur anggaran APBD berdasarkan program yang dijalankan.

Untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018-2020 maka diperlukan data anggaran dan realisasi anggarannya. Data target dan capaian, program kegiatan, sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada.

4.2.1 Pengukuran Ekonomis

Pengukuran Ekonomi ditekankan pada *input* dan biaya yang dikeluarkan, untuk mengukur tingkat ekonomi yaitu membandingkan *input* dan *input value*. Ekonomi merupakan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan guna mendapatkan suatu barang dan tidak melakukan pemborosan. Kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila

mengurangi ataupun menghilangkan biaya yang tidak perlu.

Perhitungan nilai ekonomi berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 sampai dengan 2020 menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus Ekonomis:

Ekonomis = $\frac{\text{Input}}{\text{Input value}} \times 100\%$

Input value

Kriteria Ekonomis :

< 100% Dinyatakan Sebagai Ekonomis

= 100% Dinyatakan Sebagai Ekonomis Berimbang

>100% Maka dinyatakan Sebagai Tidak Ekonomis

Keretangan :

Input : Realisasi Anggaran kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

Input value : Anggaran kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

Analisis perhitungan ekonomi untuk secara keseluruhan kegiatan dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018,2019 dan 2020 di uraikan pada tabel dibawah ini :

4.2.1.1. Pengukuran Ekonomi tahun 2018

Pada tahun 2018 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir melalui 10 program dengan 45 indikator program kegiatan dengan pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.833.175.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.411.302.904 maka tingkat ekonomi kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir 2018 adalah :

Tabel 4.1
Rasio Ekonomis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

No	Program	Anggaran	Realisasi	Penghematan	Tingkat Ekonomis (%)	Keterangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	35.000.000	29.382.000	5.618.000	83,95%	Ekonomis
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.347.000	107.362.744	92.984.256	53,59%	Ekonomis
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000	5.199.059	9.800.941	34,66%	Ekonomis
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41.250.000	41.250.000	0	100%	Ekonomis Berimbang
5	Penyediaan Alat tulis kantor	85.000.000	60.313.200	24.686.800	70,76%	Ekonomis
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000	98.202.500	1.798.000	98,20%	Ekonomis
7	Pengadaan cetak kotak arsip kantor disarpورا	28.000.000	26.730.000	1.270.000	95,46%	Ekonomis
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	49.500.000	32.733.000	16.767.000	66,13%	Ekonomis
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	30.000.000	28.490.200	1.509.800	94,97%	Ekonomis
10	Penyediaan bahan	40.000.000	39.840.000	160.000	99,60%	Ekonomis

	bacaan dan peraturan perundang-undangan		0			
11	Penyediaan makan dan minum	65.500.000	43.850.000	21.650.000	66,95%	Ekonomis
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	405.790.000	405.273.694	516.306	99,87%	Ekonomis
13	Penyediaan jasa tenaga administrasi kantor	435.550.000	357.300.000	78.250.000	84,60%	Ekonomis
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pengadaan papan struktur dan papan nama ruangan Kantor Disparpora Kab.Rohil	40.000.000	-	40.000.000	0%	Tidak Ekonomis
2	Pengadaan Personal Komputer/PC	125.000.000	123.750.000	1.250.000	99,00%	Ekonomis
3	Pengadaan printer Kantor Disparpora Kab. Rohil	50.000.000	49.500.000	500.000	99,00%	Ekonomis
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	30.000.000	15.000.000	15.000.000	50,00%	Ekonomis
5	Pemeliharaan rutin/berkala Taman kantor Disparpora Kab. Rohil	25.000.000	21.590.000	3.410.000	86,36%	Ekonomis
6	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	59.712.057	90.287.943	39,81%	Ekonomis
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	24.850.000	150.000	99,40%	Ekonomis
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	25.000.000	21.340.000	3.660.000	85,36%	Ekonomis
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	36.800.000	21.900.000	14.900.000	43,80%	Ekonomis
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian					

Kinerja dan Keuangan						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) LKPJ dan LPPD	50.000.000	29.599.900	20.400.100	59,20%	Ekonomis
2	Evaluasi Renja Disparpora Kab.Rohil	50.000.000	19.999.650	30.000.350	40,00%	Ekonomis
3	Penyusunan Penja,Renja,RKA SKPD 2018	50.000.000	25.100.000	24.900.000	50,20%	Ekonomis
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	35.000.000	19.307.650	15.692.350	55,16%	Ekonomis
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	41.000.000	23.302.650	17.697.350	56,84%	Ekonomis
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan						
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	50.000.000	48.563.650	1.436.350	97,13%	Ekonomis
2	Seleksi Paskibraka	70.000.000	63.154.900	6.845.100	90,22%	Ekonomis
3	Paskibraka Kab.Rohil	900.380.000	679.539.300	220.840.700	75,47%	Ekonomis
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga						
1	Pelaksanaan Car Free Day Kab. Rohil	130.365.000	74.194.400	56.170.600	56,91%	Ekonomis
2	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Pekanbaru	500.000.000	436.846.000	63.154.000	87,37%	Ekonomis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga						
1	Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Perlengkapan Bola volley Kec. Bagansinembah/kewajiban pihak ketiga	98.340.000	98.340.000	0	100%	Ekonomis Berimbang
2	Penyelesaian pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan Olahraga Karate pengcab TAKO	98.230.000	98.230.000	0	100%	Ekonomis Berimbang

	Kab. Rohil/Kewajiban Pihak ketiga					
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
1	Penyelesaian pembayaran pengadaan perlengkapan rebana se-Kecamatan Bagansinembah/Kewajiban pihak ketiga	98.600.000	98.600.000	0	100%	Ekonomis Berimbang
2	Penyelesaian pembayaran pengadaan peralatan kesenian Kuda Lumpung Kel.kesenian Muda sebaya Kep. Teluk piyai/kewajiban pihak ketiga	148.260.000	143.759.000	4.501.000	96,96%	Ekonomis
3	Penyelesaian pembayaran pengadaan music tradisional kuda kepang kep. Teluk piyai pesisir/kewajiban pihak ketiga	148.260.000	143.759.000	4.501.000	96,96%	Ekonomis
4	Penyelesaian pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian tradisional kuda lumping kep. Bangko lestari/kewajiban kepada pihak ketiga	98.480.000	98.480.000	0	100%	Ekonomis Berimbang
5	Peyelelesaian pembayaran pengadaan sound sistem kelompok remaja mesjid dusun rejo mulyo/kewajiban pihak ketiga	98.400.000	98.400.000	0	100%	Ekonomis Berimbang
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
1	Penyelenggaraan event wisata nasional Kab. Rohil	500.000.000	345.901.800	154.098.800	69,18%	Ekonomis
2	Mengikuti perayaan hari besar Kab. Rohil	50.000.000	31.248.050	18.751.950	62,50%	Ekonomis
3	Pelaksanaan Promosi	100.000.000	-	100.000.000	0%	Tidak

	Pariwisata Nusantara untuk Komunitas Wisata Air	0				Ekonomis
4	Pembina Komunitas Wisata Sejarah	100.000.00 0	78.603.00 0	21.397.000	78,60%	Ekonomis
5	Pelaksanaan Rakor Pelaksanaan Se-Propinsi Riau Tahun 2018	300.000.00 0	142.805.5 00	157.194.500	47,60%	Ekonomis
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
1	Pembuatan Video Klip Destinasi Wisata dan Ekonomi kreatif Rohil	80.123.000	-	80.123.000	0%	Tidak Ekonomis

Sumber : Data LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang di Olah 2022

Tabel 4.1 menunjukkan program yang dijalankan dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir memiliki 10 program kegiatan dengan total 46 indikator program. Untuk program pelayanan administrasi perkantoran yang memiliki 13 indikator program, keseluruhannya mencapai kriteria Ekonomis. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki 8 indikator program dan keseluruhannya mencapai kriteria Ekonomis, Untuk Program peningkatan sumber daya Aparatur hanya memiliki 1 indikator program dan berada pada kriteria Ekonomis. Selanjutnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan memiliki 5 indikator kinerja dan seluruhnya mencapai kriteria Ekonomis, Program peningkatan peran serta kepemudaan memiliki 3 indikator program dan seluruhnya mencapai kriteria Ekonomis, untuk program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga memiliki 2 indikator kinerja dan keduanya berada pada kriteria Ekonomis, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga memiliki

2 indikator kinerja, keduanya berada pada kriteria Ekonomis, Program pengelolaan kekayaan budaya memiliki 5 indikator kinerja dan seluruhnya berada pada kriteria Ekonomis.

Pada kegiatan jasa kebersihan kantor, Penyelesaian pengadaan perlengkapan Bola Volley Kec. Bagansinembah/Kewajiban pihak ke 3, Penyelesaian pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga karate Pengcab TAKO Kab. Rohil/Kewajiban pihak ke 3, Penyelesaian pengadaan perlengkapan Rebana Se-Kecamatan Bagansinembah/Kewajiban pihak ke 3, Penyelesaian pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian tradisional kuda lumping kep. Bangko lestari/kewajiban kepada pihak ketiga, dan Penyelesaian pembayaran pengadaan sound sistem kelompok remaja mesjid dusun rejo mulyo/kewajiban pihak ketiga, ke enam kegiatan tersebut berada pada kriteria Ekonomis Berimbang dikarenakan tingkat ekonomis mencapai 100%.

Namun untuk program berikutnya yaitu Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang memiliki 5 program, 4 di antaranya berada pada kriteria Ekonomis, namun 1 indikator program yaitu pelaksanaan promosi pariwisata nusantara untuk komunitas wisata air berada pada kriteria tidak ekonomis, dikarenakan anggaran program yang telah ditetapkan tidak berjalan. Sama halnya dengan Program pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki 1 indikator program yaitu Pembuatan video klip destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif rohil berada pada kriteria tidak

ekonomis, hal ini terjadi karena anggaran yang sudah di tetapkan tidak digunakan dengan baik.

4.2.1.2. Pengukuran Ekonomis tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir melalui 45 indikator program kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.532.871.560,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.262.114.982,20 maka tingkat ekonomis Dinas Pariwisata kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah :

Tabel 4.2
Rasio Ekonomi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Program	Anggaran	Realisasi	Penghematan	Tingkat Ekonomis (%)	Keterangan
Penyediaan Jasa Surat menyurat	142.000.000	43.506.000	98.494.000	30,64%	Ekonomis
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	268.043.000	118.867.597	149.175.403	44,35%	Ekonomis
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	28.000.000	5.177.890	22.822.110	18,49%	Ekonomis
Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.000.000	48.000.000	42.000.000	53,33%	Ekonomis
Penyediaan Alat tulis kantor	88.434.000	60.546.900	27.887.100	68,47%	Ekonomis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	218.800.000	128.739.000	90.061.000	58,84%	Ekonomis
Pengadaan cetak kotak arsip kantor disparpora	31.500.000	30.800.000	700.000	97,78%	Ekonomis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	65.000.000	41.114.000	23.886.000	63,25%	Ekonomis
Penyediaan peralatan rumah tangga	73.500.000	52.839.300	20.660.700	71,89%	Ekonomis

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	156.060.000	63.000.000	93.060.000	40,37%	Ekonomis
Penyediaan makan dan minum	99.250.000	39.350.000	59.900.000	39,65%	Ekonomis
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	940.000.000	805.543.521	134.456.479	85,70%	Ekonomis
Penyediaan jasa tenaga administrasi kantor	108.000.000	75.200.000	32.800.000	69,63%	Ekonomis
Rapat-rapat Konsultasi kedalam Daerah	300.000.000	227.819.500	72.180.500	75,94%	Ekonomis
Pengadaan Mesin tik listrik kantor Disparpora Kab.Rohil	4.000.000	0	4.000.000	0%	Tidak Ekonomis
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	156.060.000	154.867.396	1.192.604	99,23%	Ekonomis
Pemeliharaan rutin/berkala Taman kantor Disparpora Kab. Rohil	82.000.000	53.633.375	28.366.625	65,41%	Ekonomis
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	51.920.792	98.079.208	34,61%	Ekonomis
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	45.000.000	14.800.000	30.200.000	32,89%	Ekonomis
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	50.020.000	44.960.000	5.060.000	89,88%	Ekonomis
Pengadaan Pakaian Dinas Harian PDH	32.500.000	29.854.000	2.646.000	91,86%	Ekonomis
Pengadaan Pakaian khusus Pariwisata	66.000.000	0	66.000.000	0%	Tidak Ekonomis
Pendidikan dan Pelatihan Formal	350.000.000	229.606.000	120.394.000	65,60%	Ekonomis
Evaluasi Renja	33.600.000	18.282.300	15.317.700	54,41%	Ekonomis
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja (LAKIP,LKPJ, dan LPPD)	84.710.000	53.523.750	31.186.250	63,18%	Ekonomis
Revisi RENSTRA Tahun anggaran 2016-2021	81.500.000	40.107.300	41.392.700	49,21%	Ekonomis

Penyusunan Renja, RKA,DPA	90.895.000	52.023.750	38.871.250	57,23%	Ekonomis
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	47.250.000	13.726.950	33.523.050	29,05%	Ekonomis
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	67.626.000	19.403.550	48.222.450	28,69%	Ekonomis
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	75.000.000	0	75.000.000	0%	Tidak Ekonomis
Penyusunan Pelaporan Inventari Aset	67.839.800	0	67.839.800	0%	Tidak Ekonomis
Seleksi Paskibraka	200.000.000	161.940.900	38.059.100	80,97%	Ekonomis
PaskibrakaKab.Rohil	1.342.280.000	1.189.381.750	152.898.250	88,61%	Ekonomis
Pengembangan dan pemyarakatan Olahraga di Kab. Rokan hilir	100.000.000	73.218.000	26.782.000	73,22%	Ekonomis
Pengiriman atlate berprestasi Mahasiswa	100.000.000	0	100.000.000	0%	Tidak Ekonomis
Pengiriman atlate berprestasi Pelajar	196.160.000	31.931.050	164.228.950	16,28%	Ekonomis
Pendataan potensi ekonomi kreatif Rokan Hilir	90.700.000	0	90.700.000	0%	Tidak Ekonomis
Pembuatan buku destinasi,brosur wisata Kab. Rokan Hilir	85.016.000	33.000.000	52.016.000	38,82%	Ekonomis
Pembuatan rencana induk Pariwisata Daerah (RIPDA)	265.243.000	0	265.243.000	0%	Tidak Ekonomis
Sepekan Kampung Seni Bagansiapiapi	232.600.000	192.012.500	40.587.500	82,55%	Ekonomis
Workhsop Kerajinan Kulit Kerang	149.670.000	0	149.670.000	0%	Tidak Ekonomis
Workshop Kerajinan Limbah sawit/Mangrove	90.447.327	0	90.447.327	0%	Tidak Ekonomis
Pembinaan dan penyelenggaraan komunitas wisata budaya Kab.Rokan Hilir	1.335.483.300	888.794.800	446.688.500	66,55%	Ekonomis
Pelatihan pramuwisata se-Kabupaten Rokan Hilir	266.849.000	0	266.849.000	0%	Tidak Ekonomis
Pemeliharaan anjungan Rokan Hilir Pekanbaru	134.570.000	133.595.000	975.000	99,28%	Ekonomis

Pemilihan Bujang dan Dara Kab. Rokan Hilir	265.860.000	229.920.000	35.940.000	86,48%	Ekonomis
--	-------------	-------------	------------	--------	----------

Sumber : Data LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang di Olah. 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Program Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 memiliki 45 indikator program, dari 45 indikator program tersebut terdapat 35 program yang berada pada kategori Ekonomis dan 10 program berada pada kriteria tidak ekonomis, dari 10 indikator program tersebut antara lain yaitu program Pengadaan mesin tik kantor disarpورا rohil mendapatkan tingkat pengukuran ekonomis sebesar 0% hal ini menunjukkan bahwa indikator program tersebut tidak ekonomis, untuk program pengadaan pakaian khusus pariwisata mendapatkan tingkat ekonomis sebesar 0% hal ini menunjukkan bahwa indikator program tersebut tidak berjalan dengan baik dan dinyatakan tidak ekonomis, Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan mendapatkan tingkat ekonomis sebesar 0% hal ini menunjukkan bahwa program tersebut juga tidak berjalan dengan baik sehingga dinyatakan tidak ekonomis.

Untuk program penyusunan inventari aset mendapatkan tingkat ekonomis sebesar 0% dalam hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik dan dikatakan tidak ekonomis dalam pelaksanaannya, Program pengiriman atlate berprestasi mahasiswa mendapatkan tingkat ekonomis sebesar 0% dan dikatakan tidak ekonomis dalam pelaksanaan, Program pendataan potensi ekonomi kreatif rokan

hilir mendapatkan tingkat ekonomis sebesar 0% dan dapat dikatakan program tersebut tidak Ekonomis dalam pelaksanaan, Program pembuatan rencana induk Daerah (RIPDA) tingkat ekonomisnya mencapai 0% sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik dan dikatakan tidak ekonomis, Program workshop kerajinan kulit kerang mendapatkan tingkat ekonomis sebesar 0% hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut tidak Ekonomis, Program workshop kerajinan limbah sawit/mangrove tingkat ekonomisnya mencapai 0% dan hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berada pada kriteria tidak ekonomis, karena pelaksanaan kegiatannya tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, Program pelatihan pramuwisata se kabupaten Rokan Hilir mendapatkan tingkat ekonomis sebesar 0% hal ini menunjukkan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik dengan kriteria tidak Ekonomis.

4.2.1.3. Pengukuran Ekonomis tahun 2020

Pada tahun 2020 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir melalui 41 indikator program kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.942.871.321,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.765.303.593,00 maka tingkat ekonomis Dinas Pariwisata kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah :

Tabel 4.3
Rasio Ekonomis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

Program	Anggaran	Realisasi	Penghematan	Tingkat Ekonomis (%)	Keterangan
Penyediaan Jasa Surat menyurat	230.000.000	81.856.000	148.144.000	35,58%	Ekonomis

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	314.153.000	207.019.000	107.134.000	65,89%	Ekonomis
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000	9.800.200	20.199.800	32,66%	Ekonomis
Penyediaan jasa kebersihan kantor	93.819.000	59.300.000	34.519.000	63,20%	Ekonomis
Penyediaan Alat tulis kantor	98.000.000	50.500.100	47.499.900	51,53%	Ekonomis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	220.780.000	141.637.000	79.143.000	64,15%	Ekonomis
Pengadaan cetak kotak arsip kantor disarpورا	33.000.000	29.500.000	3.500.000	89,39%	Ekonomis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000	48.800.900	26.199.100	65,06%	Ekonomis
Penyediaan peralatan rumah tangga	67.930.000	59.005.000	8.925.000	86,86%	Ekonomis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	159.552.001	63.000.000	96.552.001	39,48%	Ekonomis
Penyediaan makan dan minum	102.521.000	38.200.000	64.321.000	37,26%	Ekonomis
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	990.000.000	750.112.800	239.887.200	75,76%	Ekonomis
Penyediaan jasa tenaga administrasi kantor	110.000.000	79.900.000	30.100.000	72,63%	Ekonomis
Rapat-rapat Koordinas dan komsultasi kedalam Daerah	302.002.000	227.819.500	74.182.500	75,43%	Ekonomis
Pengadaan Mesin tik listrik kantor Disarpورا Kab.Rohil	5.000.000	3.000.000	2.000.000	60%	Ekonomis
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	160.251.000	154.867.396	5.383.604	96,64%	Ekonomis
Pemeliharaan rutin/berkala Taman kantor Disarpورا Kab. Rohil	84.000.000	53.633.375	30.366.625	63,84%	Ekonomis
Pemeliharaan	154.000.000	51.920.792	102.097.208	33,71%	Ekonomis

Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	0				
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	47.025.000	14.800.000	32.225.000	31,47%	Ekonomis
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	53.020.442	44.960.000	8.060.442	84,79%	Ekonomis
Pengadaan Pakaian Dinas Harian PDH	35.000.000	29.854.000	5.146.000	85,29%	Ekonomis
Pengadaan Pakaian khusus Pariwisata	67.950.000	43.500.000	24.450.000	64,01%	Ekonomis
Pendidikan dan Pelatihan Formal	353.070.000	228.100.000	124.970.000	64,60%	Ekonomis
Evaluasi Renja	34.900.000	19.980.000	14.920.000	57,24%	Ekonomis
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja (LAKIP,LKPJ, dan LPPD)	85.960.000	55.050.000	30.910.000	64,04%	Ekonomis
Revisi RENSTRA Tahun anggaran 2016-2021	82.000.000	41.900.000	40.100.000	51,09%	Ekonomis
Penyusunan Renja, RKA,DPA	91.562.000	53.553.800	38.008.200	58,48%	Ekonomis
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	49.345.000	15.200.300	34.144.700	30,80%	Ekonomis
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	68.429.000	20.501.530	47.927.470	29,96%	Ekonomis
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	80.000.000	0	0	0%	Tidak Ekonomis
Penyusunan Pelaporan Inventari Aset	67.851.000	33.253.700	34.597.700	49%	Ekonomis
Seleksi Paskibraka	250.000.000	193.244.000	56.756.000	77,29%	Ekonomis
Paskibraka Kab.Rohil	1.392.580.000	1.241.270.700	151.309.300	89,13%	Ekonomis
Pengembangan dan pemasyarakatan Olahraga di Kab. Rokan hilir	100.000.000	61.900.000	38.100.000	61,90%	Ekonomis
Pengiriman atlate berprestasi Mahasiswa	100.000.000	66.233.000	33.767.000	66,23%	Ekonomis
Pengiriman atlate berprestasi Pelajar	200.000.000	28.300.600	171.699.400	14,15%	Ekonomis
Pendataan potensi	109.070.000	34.000.000	109.036.000	31,17%	Ekonomis

ekonomi kreatif Rokan Hilir	0				
Pembuatan buku destinasi,brosur wisata Kab. Rokan Hilir	87.768.000	38.000.000	49.768.000	43,29%	Ekonomis
Pembuatan rencana induk Pariwisata Daerah (RIPDA)	265.243.000	0	0	0%	Tidak Ekonomis
Sepekan Kampung Seni Bagansiapiapi	232.600.000	120.500.000	112.100.000	51,80%	Ekonomis
Workshop UMKM Berbasis seni Budaya	149.670.000	0	0	0%	Tidak Ekonomis
Pemeliharaan Destinasi wisata pulau jemur	90.447.000	85.800.900	4.646.100	94,86%	Ekonomis
Pembinaan dan penyelenggaraan Komunitas wisata budaya kab. Rokan Hilir	1.335.483.300	698.841.000	636.642.300	52,32%	Ekonomis
Pelaksanaan Rakor Pelaksanaan Pariwisata se-Riau	266.849.000	155.100.000	111.749.000	58,12%	Ekonomis
Pemeliharaan anjungan Rokan Hilir Pekanbaru	134.570.000	133.595.000	975.000	99,27%	Ekonomis
Pemilihan Bujang dan Dara Kab. Rokan Hilir	280.963.000	229.920.000	51.043.000	81,83%	Ekonomis

Sumber : Data LAKIP Dinas Pariwisata K5epemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang di Olah. 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 Program kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 memiliki 46 indikator program, dari 46 indikator program tersebut terdapat 43 indikator program yang berada pada kriteria Ekonomis, dan 3 indikator program berada pada kriteria Tidak Ekonomis, dari 3 program yang tidak ekonomis tersebut yaitu Program Monitoring Evaluasi pelaporan yang mendapatkan tingkat ekonomis sebesar 0% hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik dengan berada pada kriteria Tidak Ekonomis, Program selanjutnya yaitu Pembuatan rencana induk

Pariwisata Daerah (RIPDA) yang mana mendapatkan tingkat ekonomis 0% hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik dan berada pada kriteria Tidak Ekonomis, Program terakhir yang mendapatkan Kriteria Tidak Ekonomis yaitu Program Workshop UMKM Berbasis seni budaya yang mendapatkan tingkat Ekonomis sebesar 0% hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik.

4.2.2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran Efisiensi adalah perbandingan *Output* dan *Input* suatu organisasi. Semakin besar *output* yang dihasilkan di bandingkan dengan *input* yang digunakan, maka semakin besar tingkat efisien. Atau jika dana dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai keberhasilan suatu program semakin kecil, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien.

Pengukuran tingkat Efisien Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara membandingkan nilai *input* dan *output* dari data yang terdapat dalam LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Nilai *input* didapat dari persentase realisasi anggaran, sedangkan *output* didapatkan dari dari persentase pencapaian fisik pada setiap program kegiatan. Apabila hasil perbandingan kurang dari 100% maka dikatakan tidak efisien, jika hasil perbandingan sama dengan 100% maka efisien berimbang, Apabila hasil perbandingan Lebih dari 100% maka dapat dikatakan Efisien.

Perhitungan tingkat Efisiensi berdasarkan dari data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2018 sampai 2020 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} : \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

4.2.2.1 Pengukuran Efisiensi Tahun 2018

Pengukuran tingkat Efisiensi pada kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 akan dihitung menggunakan rumus di atas. Data *input* dan *output* diperoleh dari LAKIP Disparpora Rohil. *Input* adalah Persentase realisasi anggaran dan *Output* adalah Persentase Pencapaian setiap segiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Pengukuran kinerja tingkat Efisiensi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir diuraikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pengukuran tingkat Efisiensi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018

Program	Output	Input	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	80,67%	123,96%	Efisien
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	-	42,99%	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	43,80%	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	-	32,65%	-	-

Kinerja dan Keuangan				
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	74,16%	87,60%	84,65%	Tidak Efisien
Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga	18%	72,14%	24,79%	Tidak Efisien
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	15,38%	650,19%	Efisien
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	49,39%	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100%	51,57%	193,91%	Efisien
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	0%	-	-
Program Pengembangan Kemitraan	-	0%	-	-

Sumber : Data LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang di Olah 2022

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa Pengukuran tingkat Efisiensi pada kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 Memiliki 11 Program kegiatan, 3 kegiatan berada pada kriteria Efisien, 2 tidak efisien dan 6 tidak ada keterangan karena data *output* tidak tersaji didalam LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018.

Program yang tidak efisien yaitu Program peningkatan peran serta kepemudaan & Program Pembinaan dan masyarakat olahraga yang tingkat efisiensinya tidak mencapai 100%. Sedangkan 3 Program yang dinyatakan Efektif yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan tingkat Efisiensi >100%.

4.2.2.2. Pengukuran Efisiensi tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan 9 program kegiatan. Data *input* dan *output* diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). *Input* adalah Persentase realisasi anggaran dan *output* adalah Persentase Pencapaian realisasi kinerja setiap program Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Pengukuran kinerja tingkat efisien pada seluruh program Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 akan diuraikan pada tabel dibawah :

Tabel 4.5
Pengukuran tingkat Efisiensi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019

Program	Output	Input	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	57,10%	140,01%	Efisien
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	-	64,55%	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	52,48%	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	35,22%	-	-
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	105,55%	84,79%	124,48%	Efisien
Program Pembinaan dan Pemasarakatan	164%	29,83%	549,78%	Efisien

Olahraga				
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	0%	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	219,96%	38,82%	566,61%	Efisien
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	99,28%	-	-

Sumber : Data LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang di Olah 2022

Tabel 4.5 Menjelaskan bahwa Pengukuran tingkat Efisiensi pada kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 memiliki 9 program kegiatan, 4 di antaranya berada pada kategori efisien. Sedangkan 5 program lainnya tidak dapat di hitung tingkat efisiensi karena Data *Output* tidak tersaji pada LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.

Pada keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dari segi Efisiensi sudah berjalan dengan baik.

4.2.2.3. Pengukuran Efisiensi tahun 2020

Pada tahun 2020 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Melaksanakan 48 indikator Program kegiatan. Data *input* dan *output* diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). *Input* adalah persentase realisasi anggaran dan *output* adalah realisasi fisik kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Pengukuran kinerja tingkat efisien pada seluruh program Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 akan diuraikan pada tabel dibawah :

Tabel 4.6
Pengukuran tingkat Efisiensi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020

Program	Output	Input	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	59,95%	133,44%	Efisien
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	-	65,67%	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	64,60%	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	42,57%	-	-
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	252,37%	83,21%	303,29%	Efisien
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	171,50%	47,42%	361,66%	Efisien
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	99,27%	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	67,00%	43,29%	154,77%	Efisien
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	94,86%	-	-

Sumber : Data LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang di Olah 2022

Tabel 4.6 Menjelaskan bahwa Pengukuran tingkat Efisiensi pada kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 memiliki 9 program kegiatan, 4 di antaranya berada pada kategori efisien. Sedangkan 5 program lainnya tidak dapat di hitung tingkat efisiensi karena Data *Output* tidak tersaji pada LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.

Pada keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 dari segi Efisiensi sudah berjalan dengan baik.

4.2.2.4. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran Efektivitas Pada Program Kegiatan yang dijalankan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat diukur karena data *Outcome* tidak tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari tahun 2018-2020.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Hasil Perhitungan Ekonomis

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018-2020

Program	Tingkat Ekonomis					
	Tahun 2018	Kategori	Tahun 2019	Kategori	Tahun 2020	Kategori
Penyediaan Jasa Surat menyurat	83,95%	Ekonomis	30,64%	Ekonomis	35,58%	Ekonomis
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53,59%	Ekonomis	44,35%	Ekonomis	65,89%	Ekonomis
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	34,66%	Ekonomis	18,49%	Ekonomis	32,66%	Ekonomis

Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Ekonomis Berimbang	53,33%	Ekonomis	63,20%	Ekonomis
Penyediaan Alat tulis kantor	70,76%	Ekonomis	68,47%	Ekonomis	51,53%	Ekonomis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	98,20%	Ekonomis	58,84%	Ekonomis	64,15%	Ekonomis
Pengadaan cetak kotak arsip kantor disarpورا	95,46%	Ekonomis	97,78%	Ekonomis	89,39%	Ekonomis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	66,13%	Ekonomis	63,25%	Ekonomis	65,06%	Ekonomis
Penyediaan peralatan rumah tangga	94,97%	Ekonomis	71,89%	Ekonomis	86,86%	Ekonomis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99,60%	Ekonomis	40,37%	Ekonomis	39,48%	Ekonomis
Penyediaan makan dan minum	66,95%	Ekonomis	39,65%	Ekonomis	37,26%	Ekonomis
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,87%	Ekonomis	85,70%	Ekonomis	75,76%	Ekonomis
Penyediaan jasa tenaga administrasi kantor	84,60%	Ekonomis	69,63%	Ekonomis	72,63%	Ekonomis
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	-	-	75,94%	Ekonomis	75,43%	Ekonomis
Pengadaan mesin tik listrik kantor disarpورا rohil	-	-	0%	Ekonomis	60,00%	Ekonomis
Pengadaan papan struktur dan papan nama ruangan Kantor Disarpورا Kab.Rohil	0%	Ekonomis	-	-	-	-
Pengadaan Personal Komputer/PC	99,00%	Ekonomis	-	-	-	-
Pengadaan printer Kantor Disarpورا Kab. Rohil	99,00%	Ekonomis	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	50,00%	Ekonomis	99,23%	Ekonomis	96,64%	Ekonomis
Pemeliharaan rutin/berkala Taman kantor Disarpورا Kab. Rohil	86,36%	Ekonomis	65,41%	Ekonomis	63,84%	Ekonomis
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	39,81%	Ekonomis	34,61%	Ekonomis	33,71%	Ekonomis
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	99,40%	Ekonomis	32,89%	Ekonomis	31,47%	Ekonomis

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	85,36%	Ekonomis	89,88%	Ekonomis	84,79%	Ekonomis
Pengadaan pakaian Dinas Harian PDH	-	-	91,86%	Ekonomis	85,25%	Ekonomis
Pengadaan pakaian khusus Pariwisata	-	-	0%	Ekonomis	64,01%	Ekonomis
Pendidikan dan Pelatihan Formal	43,80%	Ekonomis	65,60%	Ekonomis	64,60%	Ekonomis
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) LKPJ dan LPPD	59,20%	Ekonomis	63,18%	Ekonomis	57,24%	Ekonomis
Evaluasi Renja Disparpora Kab.Rohil	40,00%	Ekonomis	54,41%	Ekonomis	64,04%	Ekonomis
Penyusunan Renja, Renja, RKA	50,20%	Ekonomis	57,23%	Ekonomis	54,48%	Ekonomis
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	55,16%	Ekonomis	29,05%	Ekonomis	30,80%	Ekonomis
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	56,84%	Ekonomis	28,69%	Ekonomis	29,96%	Ekonomis
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	97,13%	Ekonomis	-	-	-	-
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	-	-	0%	Ekonomis	0%	Ekonomis
Penyusunan/Pelaporan inventarisasi aset	-	-	0%	Ekonomis	49,00%	Ekonomis
Seleksi Paskibraka	90,22%	Ekonomis	80,97%	Ekonomis	77,29%	Ekonomis
Paskibraka Kab.Rohil	75,47%	Ekonomis	88,61%	Ekonomis	89,13%	Ekonomis
Pelaksanaan Car Free Day Kab. Rohil	56,91%	Ekonomis	-	-	-	-
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Pekanbaru	87,37%	Ekonomis	-	-	-	-
Pengembangan Pemasarakatan Olahraga Kab. Rohil	-	-	73,22%	Ekonomis	61,90%	Ekonomis
Pengiriman Atlate berprestasi Mahasiswa	-	-	0%	Ekonomis	66,23%	Ekonomis
Pengiriman Atlate berprestasi Pelajar	-	-	16,28%	Ekonomis	14,15%	Ekonomis
Pendataan Potensi ekonomi kreatif Kab. Rohil	-	-	0%	Ekonomis	31,17%	Ekonomis

Pembuatan Buku Destinasi, Brousur wisata Kab. Rokan Hilir					43,29%	Ekonomis
Pembuatan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)	-	-	0%	Ekonomis	0%	Ekonomis
Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Perlengkapan Bola volley Kec. Bagansinembah/kewajiban pihak ketiga	100%	Ekonomis Berimbang	-	-	-	-
Penyelesaian pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan Olahraga Karate pencab TAKO Kab. Rohil/Kewajiban Pihak ketiga	100%	Ekonomis Berimbang	-	-	-	-
Penyelesaian pembayaran pengadaan perlengkapan rebana se-Kecamatan Bagansinembah/Kewajiban pihak ketiga	100%	Ekonomis Berimbang	-	-	-	-
Penyelesaian pembayaran pengadaan peralatan kesenian Kuda Lumping Kel.kesenian Muda sebaya Kep. Teluk piyai/kewajiban pihak ketiga	96,96%	Ekonomis	-	-	-	-
Penyelesaian pembayaran pengadaan music tradisional kuda kepang kep. Teluk piyai pesisir/kewajiban pihak ketiga	96,96%	Ekonomis	-	-	-	-
Penyelesaian pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian tradisional kuda lumping kep. Bangko lestari/kewajiban kepada pihak ketiga	100%	Ekonomis Berimbang	-	-	-	-
Peyelesaian pembayaran pengadaan sound sistem kelompok remaja mesjid dusun rejo mulyo/kewajiban pihak ketiga	100%	Ekonomis Berimbang	-	-	-	-
Penyelenggaraan event wisata nasional Kab. Rohil	69,18%	Ekonomis	-	-	-	-
Mengikuti perayaan hari besar Kab. Rohil	62,50%	Ekonomis	-	-	-	-
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara untuk	0%	Ekonomis	-	-	-	-

Komunitas Wisata Air						
Pembina Komunitas Wisata Sejarah	78,60%	Ekonomis	-	-	-	-
Pelaksanaan Rakor Pelaksanaan Se-Propinsi Riau Tahun 2018	47,60%	Ekonomis	-	-	-	-
Pembuatan Video Klip Destinasi Wisata dan Ekonomi kreatif Rohil	0%		-	-	-	-
Sepekan Kampung Seni Bagansiapiapi	-	-	82,55%	Ekonomis	51,80%	Ekonomis
Workshop UMKM Berbasis seni budaya	-	-	-	-	0%	Ekonomis
Pemiliharaan Destinasi wisata Pulau Jemur	-	-	-	-	94,86%	Ekonomis
Workshop Kerajinan Kulit Kerang	-	-	0%	Ekonomis	-	-
Workshop Kerajinan Limbah sawit/Mangrove	-	-	0%	Ekonomis	-	-
Pembinaan dan Penyelenggaraan Komunitas Wisata budaya Kab. Rokan Hilir	-	-	66,55%	Ekonomis	52,32%	Ekonomis
Pelaksanaan Rakor Pelaksanaan Pariwisata Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-	58,12%	Ekonomis
Pelatihan Pramuwisata se-Kabupaten Rokan Hilir	-	-	0%	Ekonomis	-	-
Pemiliharaan anjungan Rokan Hilir di Pekanbaru	-	-	99,28%	Ekonomis	99,27%	Ekonomis
Pemilihan Bujan Dara Kab. Rokan Hilir	-	-	86,48%	Ekonomis	81,83%	Ekonomis

Sumber : Data LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang di olah, 2022

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir selalu Ekonomi setiap tahunnya selama tiga tahun berturut-turut, tingkat ekonominya selalu mengalami kenaikan. Dikarenakan anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga realisasi anggaran dan tingkat

ekonomis yang di dapat juga mengalami kenaikan.

Jika kegiatan operasional dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu, maka kegiatan dapat dikatakan ekonomis. Maka disimpulkan bahwa semakin kecil persentase ekonomi maka keuangan instansi semakin baik, dengan hasil perhitungan ekonomi selama tiga tahun terakhir. Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan berhasil menunjukkan kinerja baik. Setiap program yang dijalankan selalu ekonomi setiap tahunnya. Karena tingkat ekonomi tidak pernah lebih dari 100%.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dinilai sudah bisa menghemat dana dalam menjalankan program kegiatan yang ditetapkan dengan cara sangat ekonomis, misalnya tidak melakukan pemborosan kepada pengeluaran, menghindari pengeluaran yang tidak produktif, mengurangi biaya yang tidak diperlukan dalam pengadaan, serta alokasi sumber daya dilakukan sebaik-baiknya. Dari segi ekonomis, Penulis menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan program kegiatan sudah Ekonomis.

4.3.2 Hasil Perhitungan Efisiensi

4.8 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018-2020

Program	Tingkat Efektivitas					
	Tahun 2018	Kategori	Tahun 2019	Kategori	Tahun 2020	Kategori
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	123,96 %	Efisien	140,01 %	Efektif	133,44 %	Efisien
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Peran Kepemudaan	84,65%	Tidak Efisien	124,48 %	Efektif	303,29 %	Efisien
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	24,79%	Tidak Efisien	549,78 %	Efektif	361,66 %	Efisien
Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	650,19 %	Efisien	-	-	-	-
Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	193,91 %	Efisien	566,61 %	Efektif	154,77 %	Efisien
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kemitraan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang di olah, 2022

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Perhitungan Efisiensi dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki 11 Program kegiatan 2 Program berada pada kriteria tidak Efisien karena tidak mencapai tingkat efisiensi 100%, dan 3 lainnya berada pada kriteria Efisien. Perhitungan tingkat efisiensi ditahun 2019 berdasarkan 9 program kegiatan 4 diantaranya berada pada kriteria

Efisien dan 5 lainnya tidak dapat di hitung karena *Output* tidak tersedia. Selanjutnya ditahun 2020 menjalankan 9 Program kegiatan dan 4 program berada pada kategori Efisien dan 5 lainnya juga sama dengan tahun sebelumnya, tidak dapat di hitung.

Dengan Hasil Perhitungan Efisiensi selama tiga tahun, Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dinilai Cukup berhasil dalam menjalankan program kegiatan dinilai dari elemen efisien.

4.3.3 Hasil Perhitungan Efektivitas

Hasil Perhitungan Efektivitas Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2018-2020 tidak dapat dihitung, dikarenakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disparpora Rokan Hilir dari tahun 2018-2020 tidak Memuat data *Outcome* yang berguna untuk penjumlahan guna mencari tingkat Efektivitas dari suatu Program Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

Maka dari itu Penulis tidak bisa mencari tingkat Efektivitas dari suatu Program kegiatan yang dijalankan dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir sesuai rumus yang berlaku.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan :

Tingkat Ekonomis kinerja pengelolaan anggaran Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir di kategorikan Ekonomis,. Ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran baik dalam merealisasikan program/kegiatan yang ingin dicapai dengan penghematan yang baik.

Tingkat Efisiensi kinerja pengelolaan anggaran tahun 2018-2020 dapat di katakana Cukup baik dan dikategorikan Efisien, karena dua tahun terakhir keseluruhan kegiatan berada pada kriteria Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang baik dalam menjalankan program kegiatan.

Tingkat Efektivitas kinerja pengelolaan anggaran tahun 2018-2020 tidak dapat dinilai dikarenakan LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tidak memuat data *Outcome* sehingga penulis tidak dapat menjumlahkan Tingkat Efektivitas pada program yang dijalankan.

B. Saran

Saran yang penulis sampaikan untuk Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir antara lain :

1. Dilihat dari tingkat ekonomis, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Rokan Hilir di harapkan lebih mampu untuk menghemat anggaran yang telah ada semaksimal mungkin, sehingga apa yang telah direncanakan di anggaran bisa terlaksana dan tercapai dengan maksimal.

2. Dari segi Efisiensi, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir harus lebih memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga kegiatan yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan dikatakan efisien.

3. Dari segi Efektivitas, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir kedepannya harus memuat data *Outcome* yang berguna untuk mencari hasil tingkat efektivitas dari program yang dijalankan sehingga bisa memuat LAKIP yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. (2018). *Lex Crimen*, 6(10), 1–11.
- Bilgah. (2018). *Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada PT Astra International Jakarta Utara*. *Cakrawala*, 18(2), 213–220. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4127>
- Erawan, P. A. D. I., Wira, S., Santosa, A. D. I., Beny, D. K., Tedy, I. P., & Wahyudi, A. (2018). *PERANAN VALUE FOR MONEY UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG*. 8(3), 187–193.
- Fay, D. L. (1967). *Kinerja Keuangan Perusahaan*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 11–82.
- Fitriani. 2017. *Alisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Makassar
- Halim, Abdul., dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kariyoto. 2017. *Implementasi Value For Money, Input Output Outcome Dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. *Jibeka*, 11(1): 72 - 82
- (Kinerja & Kerja, 2020)Kinerja, P., & Kerja, P. (2020). penilaian kinerja. *Simamora, Nadapdap,Rajagukguk*, 6, 87–94.
- Kristiyanti, M. (2012). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 3(3), 103–123. <http://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiah-informatika/article/view/79>
- (Kinerja & Kerja, 2020)Kinerja, P., & Kerja, P. (2020). penilaian kinerja. *Simamora, Nadapdap,Rajagukguk*, 6, 87–94.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta: Penerbit UII Press
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi

Ilmu Manajemen YKPN.

- Mardiasmo. (2000). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 4(1).
Mardiasmo. . Yogyakarta: Andi 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*
- Nafarin, M. 2012. *Penganggaran Rencana Kerja perusahaan Edisi Kesatu*. Jakarta Salemba Empat
- (Nst et al., 2018)Nst, A. P., Si, M., Handoko, B., & Masalah, A. L. B. (2018). *Vol. 8 No.2 Januari 2018*. 8(2), 15–25.
- Pratama, I. W., & Sukarno, G. (2021). *Analisis Penilaian Kinerja , Reward , dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur*. 30(02), 20–32.
- Pratiwi, N. P. P., Sunarwijaya, I. K., & Adiyandnya, M. S. P. (2021). Kinerja sistem informasi akuntansi dan faktor- faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 403–412. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/download/1716/1378>
- Priambodo, W. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Cv. Surya Prima Solusindo Surabaya. *Accounting and Management Journal*, 3(1), 37–42. <https://doi.org/10.33086/amj.v3i1.1189>
- Purwadi, Yuni., R. M. Sari. 2015. Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Pada Dinas Pu Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. *Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*. 2(2): 259-281
- (Reza Nanda* 1 , Darwanis 2 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail: reza.taluaxs@gmail.com* 1 , dws_am@yahoo.com* 2, 2016)Reza Nanda*1, Darwanis21Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail: reza.taluaxs@gmail.com*1, dws_am@yahoo.com*2. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja PadaPemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 1,(1), 327–340.
- Reza Nanda*1, Darwanis21Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail: reza.taluaxs@gmail.com*1, dws_am@yahoo.com*2. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja PadaPemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 1,(1), 327–340.
- (RI, 2017)RI, M. K. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214 tahun 2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga*. 1–43.

Rorong, R.O., L. Kalang., & D, Affandi. 2017. Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kota Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2): 2331 -2340

Sajangbati, I. A. S., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (n.d.). *Issn 2303-1174*. 1(4), 667–678.

Yulitiawati., Rusmidarti. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Di Kabupaten OKU. *Program studi Akuntansi Universitas Baturaja*, Hal: 91-109.

U No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999

Permendagri, (2006), *Permendagri* No.13/2006 1-73.

(Permendagri, 2006) Permendagri. (2006). *Permendagri* No. 13/2006. 1-73

(Presiden RI, 2014)Presiden RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur*. 30(02).20-32.

(RI,2017)RI,M,K. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214 Tahun 2017 Mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga*. 1-43.